

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENATAAN PARKIR DIKOTA TALUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS : JL. JENDRAL SUDIRMAN)**

SKRIPSI

*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



Disusun Oleh:

**NINA SURIANI
NPM: 220411059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TALUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENATAAN PARKIR DIKOTA
TALUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (STUDI KASUS: TAMAN JALUR-
PASAR RAKYAT)
NAMA : NINA SURIANI
NPM : 220411059
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

RIKA RAMADHANTI S.I.P., M.Si
NIDN. 1030058402

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS

SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
2. SAHRI MUHARAM S.Sos., M.Si
3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si

(Pembimbing I)

(Anggota)

(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

PERTANYAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah in :

Nama : Nina Suriani
NPM : 220411059
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singing (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman).**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebabkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat angsur-angsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Taluk Kuantan, 1 April 2026
Yang Membuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
CS745ANX351452542
Nina Suriani
Npm. 220411059

MOTTO HIDUP

“..Jadilah seperti karang dilautan yang dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada kepada dia-lah tempat meminta dan memohon..”

“..Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan dan berakhir dengan kebahagiaan..”

“..Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT..”

“..Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya..”

“..Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar..”(Al-Baqarah : 153)

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya mmenjadikan saya mmanusia yang senentiasa berpikir, berilmu, berimman dan bersabar dalam mmenjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat untuk menjalani hidup dan terima kasih kepada abang dan kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-NYA lah kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ahli keluarga yang mulia

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos) pada Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Judul Skripsi penelitian adalah **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta tantangan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Ibu DR. Ikrima Mailani, S.PDi., M.Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing 2

yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku selaku Dosen Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial, sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu selama dibangku kuliah.
5. Ayahanda tercinta Alfen Siregar, dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang tersayang Ali Akbar, Kaka Tersayang Gustina Wulandari, dan Adik tersayang Selfi Marshanda yang telah memberikan semangat kepada peneliti untuk selalu berusaha dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman yang saya banggakan in the geng manphusoes yang telah membantu memberikan kebahagiaan dan memberikan semangat kepada peneliti.

8. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesinya skripsi ini yang tidak dapat ppeneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mendo'akan agar Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya yang berlipat ganda untuk segala kelencaran yang telah diberikan dan besar harapan peneliti, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Taluk Kuantan, 1 April 2026



Nina Suriani

220411059

DAFTAR ISI

Halaman :

JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO HIDUP.....	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Organisasi	12
2.1.3 Teori Manajemen	14
2.1.4 Teori Sumber Daya Manusia	17

2.1.5 Kebijakan Publik.....	20
2.1.6 Teori Pelayanan.....	24
2.1.7 Teori Konsep Program Kerja	28
2.1.8 Teori Otonomi Daerah	28
2.1.9 Teori Pemerintah daerah	29
2.2 Kerangka Pemikiran	30
2.3 Hipotesa kerja	31
2.4 Defenisi Operasional	32
2.4.1 Komunikasi.....	32
2.4.2 Sumber daya	32
2.4.3 Disposisi.....	33
2.4.4 Struktur Birokrasi	33
2.5 Operasional Variabel Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Informan	36
3.3 Sumber Data Penelitian	37
3.2.1 Data Primer	37
3.2.2 Data Sakunder.....	38
3.4 Fokus Penelitian	38
3.5 Lokasi Penelitian	38
3.6 Metode Pengumpulan Data	38
3.7 Metode Analisis Data	39
3.8 Jadwal kegiatan Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi	42

4.1.1 Letak Geografis.....	43
4.1.2 Batas Wilayah	43
4.1.3 Visi dan Misi	43
4.2 Sejarah Dinas Perhubungan.....	44
p4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan.....	45
4.3 Taman Jalur.....	46
4.4 Pasar Rakyat	47
4.5 Struktur Dinas Perhubungan.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Identitas Responden	49
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
5.3 Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala	80
5.4 Pembahasan	88
BAB VI PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DOKUMENTASI	93

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman :
Tabel 2.1 Konsep, Indikator, dan Item Penilaian	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi	36
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 5.1 Identitas Responen Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2.1 Dokumentasi	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Wawancara Kualitatif
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset Penelitian
Lampiran 5	: Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian
Lampiran 6	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian
Lampiran 7	: Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian
Lampiran 8	: Daftar riwayat Hidup

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN
PARKIR DIKOTA TALUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (STUDI KASUS : JL. JENDRAL SUDIRMAN)

NINA SURIANI
220411059

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kauntan Singingi, khususnya pada kawasan Jl. Jendral Sudirman yang merupakan pusat aktivitas masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya parkir yang tidak tertata dengan baik, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis ini menggunakan teori implementasi kebijakan mmenurut Edward III yang menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga dikaji dalam perspektif otonomi daerah berdasarkan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan penegakan kebijakan parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penegakan parkir di Kota Taluk Kuantan sudah cukup terimplementasi. Dikota Taluk Kuantan di Jl. Jendral Sudirman masih ada kendaraan yang belum tertib dan sebagian sudah tertib. Meskipun masih ada kendala dalam pemahaman sebagian masyarakat dalam perparkiran ini dalam menertibkan kendaraan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan Parkir

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN PARKING
ARRANGEMENT IN TALUK KUANTAN CITY, KUANTAN SINGINGI
REGENCY (CASE STUDY: JL. JENDRA SUDIRMAN)

NINA SURIANI
220411059

This study aims to analyze the implementation of government parking management policies in Taluk Kuantan City, Kauntan Singingi Regency, specifically in the area of Jl. Jendral Sudirman, which is a center of community activity. The problem in this study is the persistence of poorly organized parking and limited facilities and infrastructure. This study used a qualitative approach, collecting data through interviews, observation, and documentation. This analysis utilizes Edward III's theory of policy implementation, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Furthermore, this study is also examined from the perspective of regional autonomy based on the law that grants local governments the authority to manage and enforce parking policies as part of Regional Original Revenue. The results indicate that the implementation of parking enforcement policies in Taluk Kuantan City has been adequately implemented. In Taluk Kuantan City, on Jl. Jendral Sudirman, some vehicles remain undisciplined, while others have been. However, some residents still struggle to understand and enforce parking regulations.

Keywords: Policy Implementation, Parking Arrangement

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan penduduk serta tingginya perekonomian disuatu perkotaan atau meningkatnya suatu perkotaan yang dimana mengakibatkan fasilitas-fasilitas masyarakat yang meningkat dan dibutuhkan masyarakat yang ada di Taluk Kuantan. Dalam hal ini meningkatnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan maka ada upaya dalam mengatur penggunaan ruang parkir agar kendaraan tertata dengan rapi, aman, efesiensi, dan tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kegiatan yang ada dilingkungan sekitarnya. Transportasi merupakan salah satu aspek dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan parker belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah.

Penataan merupakan salah satu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan ketentuan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu penyelenggaraan pemerintah, dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil, atau proses menata. (Badudu, Zain, 1996 : 132).

Menurut Djern Perhubungan Darat, (1996) Parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tanim, (2002) mendefenisikan parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan. Namun penggunaan dibadan jalan sebagai lahan parkir dipusat kota

dapat mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan berkurangnya tingkat pelayanan jalan. (Firzan & Isya, 2023 : 112)

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan. Bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat (5), peraturan Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atau Pelayanan Parkir di Tepi Jalan.

Pengeluaran Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40 dan 41 Tahun 2024 berkaitan erat dengan kebutuhan akan pengelolaan parkir yang lebih baik di tengah perkembangan kota yang pesat. Melalui pengaturan yang jelas, diharapkan dapat terwujud sistem parkir yang tertib, aman, dan mendukung kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Pengaturan parkir yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, menghindari kemacetan, dan menjaga keamanan kendaraan. Dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang terjadi di kawasan perkotaan, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan tanpa dirapikan sering kali mengganggu lalu lintas dan berpotensi

juga menyebabkan kemacetan. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan, baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki.

Peraturan Bupati diatas adalah bentuk suatu peraturan yang memperbolehkan parkir dibadan jalan dan ditepi jalan. Peneliti sudah datang ke Dinas Perhubungan langsung dengan maksud meminta data atau keterangan lainnya yang menyangkut tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman)”. Peneliti mencari informasi tentang parkir dibadan jalan dan ditepi jalan yang mana diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni didepan tempat pemberlanjaan seperti pertokoan dan mall. Umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada disekitar tempat atau pusat kegiatan seperti pertokoan dan mall. Untuk memberikan penataan parkir yang rapih dan tertib guna meberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna fasilitas parkir untuk badan jalan umum, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas parkir.

Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan produk pemerintahan otonomi justru membenarkan untuk dilakukan pungutan retribusi parkir yang menggunakan badan jalan raya dan ditepi jalan raya. Tetapi dengan syarat adanya seragam resmi, ID card (tanda pengenalan), dan peluit yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

Tapi selain itu, Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dikenal dengan kota wisata, karena memiliki pesonanya tersendiri. Mulai dari orang tua, remaja-remaja, anak-anak sering berliburan ketaluk kuantan tepatnya

diarena pacu jalur. Kadang terdapat juga tindakan juru parkir yang muncul tiba-tiba untuk meminta uang saat hendak meninggalkan lokasi, padahal pada saat datang dan turun dari motor tidak ada situkang juru parkir yang mencari tempat dan menjaga diarena tersebut. Maka karena itu kita harus melihat apakah sijuru parkir ini memakai seragam yang diberikan Pemerintah melalui Dinas perhubungan, dan ID card (tanda pengenal) yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Jika diantara itu tidak ada berarti itu termasuk ke dalam parkir ilegal. karena sebelum menulis ini saya sudah turun lapangan untuk menemukan jawaban yang tepat untuk masalah ini.

Wilayah di Jalan Jendral Sudirman, Ps. Taluk Kuantan, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten kuantan Singingi, Riau harus menata parkir dengan rapih dan tertib karena semua aktifitas kegiatan ini akan menimbulkan masalah yang luas jika penataan ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Kenapa penataan parkir sangat diperlukan karena dapat merusak keindahan kota dan juga membuat arus lalu lintas menjadi macet nantinya jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Kota teluk kuantan ini dibagian Taman Jalur hingga Pasar Rakyat sangatlah banyak dikunjungi orang-orang dan dijadikan tempat weekend yang banyak didatangi dari desa manapun itu.

Bukan itu saja Taluk Kuantan disetiap pusat pembelanjaan memiliki tempat jajanan yang beraneka macam atau berbagai jenis makanan yang bisa kita beli. Tetapi masalahnya jika kita masuk kedalam arena tersebut maka yang sering kita lihat yaitu motor kurang penataan dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat yang masih rendah. Dengan kekurangan ini banyak

pengendara yang masih sering memarkirkan kendaraannya secara sembarangan, yang dimana dapat menghambat kelancaran lalu lintas, sebagian juga ada yang tertib dan rapi kendaraannya. Bukan itu saja masalah yang akan timbul jika kendaraan tidak tertib, tetapi juga maka bisa terjadinya kerusakan pada motor atau lecet karena masyarakat kurang sadar akan penataan parkir yang tertib. Yang nantinya akan menimbulkan perdebatan atau pertengkaran mulut. Kurangnya kesadaran ini juga cerminan dari rendahnya kepatuhan terhadap marka parkir, rambu, jalur keluar masuk kendaraan, serta ketidak disiplin membayar retribusi parkir resmi. Selain itu juga ada anggapan terhadap bahwa penataan parkir bukan bagian dari tanggung jawab bersama melainkan hanya tugas pemerintah atau juru parkir saja. Masyarakat perlu meningkatkan sosialisasinya agar bisa menciptakan budaya tertib parkir yang mendukung kenyamanan, keselamatan, serta keteraturan ruang publik.

Saat ini pengelolaan parkir diwilayah taluk kuantan telah diawasi oleh pihak Dinas Perhubungan guna untuk meingkatkan ketertiban dan pelayanan parkir. Sistem pengelolaan parkir menerapkan setoran yang diambil secara rutin setiap 1x24 jam. Yang dimana setoran harian tidak bersifat tetap karena tergantung pada jumlah kendaraan yang parkir. Besaran setoran dari satu juru parkir kurang lebih sebesar Rp. 700.000 perbulan dan juga ada kurang lebih sebesar Rp. 500.000 perbulannya disetiap lokasi berbeda-beda pendapatannya, hal ini disebabkan karena jumlah yang diperoleh tidak dapat ditentukan secara pasti. Jumlah juru parkir kurang lebih ada 7 orang juru parkir yang ada di wilayah Jl. Jendral Sudirman.

Seperti yang disebutkan diatas maka lahan parkir yang luas atau memadai sangat diperlukan dikota taluk kuantan. Dengan adanya parkir tersendiri maka bisa menghindari kriminalitas, kriminalitas yang dimaksud disini yaitu menjaga keamanan kendaraan dari pencuri. Tapi permasalahan parkir ini akan sulit diatasi dikarenakan lahan untuk parkir sangat sulit untuk dicari. Dikota taluk kuantan sekarang parkir sudah didepan toko pedagang masing-masing yang dijaga oleh tukang juru parkir walaupun masih dibadan jalan dan ditepi jalan yang harus ditata dengan baik, tetapi peneliti berharap supaya juru parkir tegas kepada pengendara agar benar-benar bisa membuat parkir rapih dan tertib agar agar bisa terwujudnya penataan yang baik bagi kota taluk kuantan ini. Sebagian orang bekerja menjadi tukang parkir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bisa dibilang mata pencahariannya dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan terkait penyelenggaraan parkir, baik dibadan jalan dan maupun ditepi jalan raya. Peraturan ini ditetapkan untuk bertujuan agar pelayanan parkir ini tertib, aman, memiliki dasar hukum, serta tidak menimbulkan kemacetan. Juru parkir harus bijak dalam memahami peraturan tersebut agar terciptanya lingkungan parkir yang nyaman bagi semua orang.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan terkait penataan dan perparkiran di daerah tersebut mmmasih menghadapi berbagai kendala serta permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius dari pihak-pihak terkait dalam parkir ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik

penelitian dengan judul sebagai berikut : **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dikota taluk kuantan banyak juga orang yang tidak mentaati tata tertib dalam parkir dalam atau parkir dengan sembarangan. Selain itu juga arena parkir yang belum memadai akan sangat susah mengatasi permasalahan yang ada. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi(Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk menjaga ketertiban orang dalam berkendara sesuai dengan lahan dan arahan dari tukang parkir biar tertata dengan rapih dan tidak merusak keindahan kota taluk kuantan. Dan peneliti bisa mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Pasar Rakyat-Pasar Rakyat).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masukan bagi pemerintah daerah supaya bisa memberikan kualitas yang baik bagi kota taluk kuantan kedepannya dalam penataan parkir.

- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singing (Studi Kasus Jl. Jendral Sudirman).

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan gambaran penataan parkir yang terorganisir, mobilitas masyarakat akan meningkat karena akses tempat parkir yang teratur dan tertib.
- b. Memeperoleh atai mencari kebenaran terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara etimologi menurut Ali (2015 : 23) apa yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelolah. Maka semuanya mengandung maskud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan yang dinamika. Administrasi adalah kerja sama yang didasari pada asensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kranenbrug (dalam syafiie, 2016 : 25) negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat.

Administrasi publik sebenarnya ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut

pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi negara (Thoha, 2018 : 144).

Administrasi negara adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan untuk mengurus negara dengan menggunakan instrument pengaturan sehingga proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengurus negara dan masyarakat senantiasa berjalan dengan teratur dalam efektif (Makmur, 2017 : 30).

Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara (Kumortono, 2015 : 82).

Henry Fayol (dalam Anggara, 2015 : 88) memisahkan fungsi administrasi kedalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasikan
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36) :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga ataupun orang lain.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, dilaut, dan diudara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagainya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat mengehendaki administrasi negara terbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dipihak lain administrasi negara mempuntai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafii, 2016 : 3) ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memilih sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

2.1.2 Teori Organisasi

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran (Zainal, dkk 2017 : 169).

Menurut Stoner, (dalam Mulyadi, 2015 : 6) organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui nama orang-orang dibawah pengarahan pimpinan mengejar tujuan bersama.

Dalam Nurdin (2023 : 57) perkembangan teori organisasi secara umum dimaksudkan untuk lebih memahami latar belakang adanya teori organisasi beserta evolusinya.

Menurut Fahmi (2016 : 1) Organisasi adalah sebuah wadah yang memiliki muli peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta

mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Menurut Scott & Davis (dalam Iswandi, 2025 : 5) menekankan bahwa teori organisasi merupakan studi ilmiah mengenai organisasi sbagai sistem kompleks yang melibatkan interaksi manusia, aturan formal, serta pengaruh lingkungan eksternal.

Menurut Elton Mayo 1927 yang membentuk aliran antar manusia (*human relation*) dalam (Nurdin, 2023 : 61), memandang organisasi sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia manusia dibanding sisi mesin.pada masa ini dilakukan percobaan yang menyangkut rancang ulang pekerjaan, perubahan panjangnya hari kerja dan waktu kerja dalam seminggu, pengenalan waktu istirahat, serta rencana upah individual dibandingkan dengan upah kelompok.

Hawthorne mempersatukan pandangan Tylor, Fayol, dan Weber (dalam Nurdin, 2023 : 61-62) dengan menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama. Organisasi terdiri dari tugas-tugas dan manusia yang harus dipertahankan pada suatu keseimbangan.

Sedangkan menurut Adam Wijaya, (dalam Mulyadi, 2015 : 11) perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan Tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap manusia.

Menurut Simamora (dalam Sinambela, 2021 : 7) manajemen adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang memiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses yang dimaksud melibatkan

organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut.

2.1.3 Teori Manajemen

Menurut Frederik W. Taylor, 1974 (dalam Hayat, 2017 : 10) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.

Proses manajemen itu sendiri, menurut Safroni (dalam Hayat, 2017 : 9) adalah suatu siklus, apabila prosesnya berkualitas maka akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan yang berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur berdampak pada output yang menghasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. Kinerja didukung oleh sumber daya aparatur yang baik, komponen dan berkualitas. Siklus manajemen inilah yang menghasilkan organisasi yang sehat.

Hasibuan (2016 : 1) Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

Oliver Shedon (Hayat, 2017 : 10) juga mengemukakan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

Menurut George Terry 1964 (dalam Hayat, 2017 : 10) Disisi lain, manajemen dimaksudkan sebagai suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya.

Sementara menurut Bittle & Bittle (dalam Hayat, 2017 : 11), bahwa dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagi ke dalam beberapa definisi, antara lain bahwa manajemen menentukan kerja tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan pentingnya pengetahuan yang teruji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manajerial. Disisi lain manajemen didefinisikan sebagai suatu badan pengetahuan yang dapat diajarkan, diperlukan untuk pelajaran sekolah, lembaga, dan institusi-institusi. Manajemen adalah apa yang manajer kerjakan dalam pelaksanaan peranan mereka sebagai manajer.

Manajemen publik menurut Overman (dalam Hayat, 2017 : 11) adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, dan controlling dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Tentunya manajemen publik berkaitan dgn fungsi sistem yang dibangun dalam organisasi publik yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam kerangka membangun pola kerja sama yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Mulyadi & Winarso (dalam Diwyarthi, 2021 : 2) menjelaskan bahwa “*manage*” memiliki arti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal dengan sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku, sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapaitujuan

utama sebuah organisasi atau bisnis melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien.

Sementara Hellriegel dan Slocum (Hayat, 2017 : 12), memberikan penafsiran bahwa manajemen birokrasi adalah suatu pendekatan manajemen ideal untuk organisasi besar yang menekankan pada aturan-aturan seperangkat hierarki, pembagian kerja yang jelas dan tuntas, mengikuti prosedur-prosedur dan menitikberatkan pada struktur keorganisasian secara menyeluruh.

Menurut Harsono, dkk menjelaskan bahwa teori manajemen berkembang melalui tiga tahapan yaitu Teori Manajemen Ilmiah, Teori Organisasi Klasik, dan Teori Manajemen Perilaku (dalam Diwyarthi, 2018 : 12) yang meliputi sebagai berikut :

a. Teori manajemen ilmiah

Teori manajemen ini menitikberatkan pada upaya peningkatan produktivitas kerja.

Teori yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan prestasi kerja adalah dengan melakukan efisiensi kerja.

b. Teori organisasi klasik

Teori ini dikenal juga dengan teori manajemen administrasi. Teori organisasi klasik ini menitikberatkan pada kebutuhan untuk membuat pedoman dalam mengelola organisasi yang bersifat kompleks dan rumit.

c. Teori manajemen perilaku

Teori ini berkembang karena teori organisasi klasik tidak mampu mencapai keselarasan antara efisiensi produksi dan harmonisasi kerja.

Jadi yang dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen hampir mempunyai konsepsi yang sama. Bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan secara berkerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah suatu usaha dalam pencapaian tujuan dimana kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan dalam melakukan suatu kegiatan melalui proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.

2.1.4 Teori Sumber Daya Manusia

Nawawi (dalam Irham, 2016 : 1) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah sebagai alat salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi MSDM juga disedbut dengan personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut pendapat Malayu S.P Hasibuan (2016 : 9) mengemukakan bahwa Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara 2001 (dalam Sinambela, 2021 : 7) manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Kemudian dikemukakan bahwa MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam buku Sinembela (2021 : 7) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Dalam Sinambela (2021 : 8) Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi atau organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut A.F Stoner (Sinambela, (2021 : 8) manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau organisasi dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Schuler & Jackson 1997 (dalam Sinambela, 2021 : 9) unsur manajemen (*tool of management*), biasa dikenal *market//marketing*, pasar tenaga kerja. Ketika mengelola SDM melibatkan setiap orang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit

Hasibuan (Sinambela, 2021 : 8) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat.

Gary Dessler 1997 dalam (Sinambela, 2021 : 8) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk

menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia (SDM) dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pemberian imbalan, dan penilaian.

Ndraha 1999 dalam (Sinambela, 2021 : 9) sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional.

Menurut Sihotang 2001 (dalam Sinambela, 2021 : 8) pada hakikatnya MSDM merupakan gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan pada setiap organisasi. Oleh sebab itu, MSDM adalah keseluruhan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan seleksi, pelatihan, penempatan, pemberian kompensasi, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan SDM untuk tercapainya berbagai tujuan individu, masyarakat, pelanggan pemerintah dan organisasi yang bersangkutan.

Sinambela (2021 :8) manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem perencanaan, penyusunan, pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Sementara itu. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses rekrutmen, pendayagunaan, pengembangan dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk

mencapai tingkat pendayagunaan SDM yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.

2.1.5 Kebijakan Publik

Menurut Syafaruddin (dalam Duryat, 2022 : 3) kebijakan adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manager dan personal dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat.

Helgo (Abidin, 2016 : 6) mengemukakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis dari pada sebagai suatu rumusan kata-kata. Oleh karena itu, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analisis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri.

Jones (Abidin, 2016 : 6) merumuskan kebijakan sebagai suatu *“behavioral consistency to resolve public problems”* (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan.

Budiarjo (Duryat, 2022 : 3) bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegiatan kegagalan implementasi kebijakan antara lain (dalam Putranto, 2019 : 128) sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Putranto, 2019 : 130) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

2. Sumber daya

Edward III (Putranto, 2019 : 131) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Yang diamana meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi, dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Edward III (dalam Putranto, 2019 : 136) disposisi adalah sebagai kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan tdaai secara sungguh sehingga apa menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan Untuk memastikan bahwa sikap, komitmen, pemahaman, dan kemauan para pelaksana kebijakan (terutama aparatur pemerintah, juru parkir, pengawas dan pihak terkait lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III (Putranto, 2019 : 141) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Thomas Dye (dalam Abidin, 2016 : 5) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever govermnet choose to do or not to do*). Defenisi ini dibuatnya dengan menghuubungkan beberapa defenisi lain dari David Easton, Lasswll dan Kaplan, serta carl Friedrich. Aetson menyebutkan kebijakn pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat.tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goals, balue and practies*). Friedhich mmengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), dan kehendak (*purpose*).

Menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin, 2016 : 6) menyebutkan kebijakan sebagai “*a course action intended to accomplish some end*” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi Hego selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu sebagai berikut:

1. Tujuan yang dimaksud tujuan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*) : bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.

2. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

William Dunn (Abidin, 2016 : 7) mmengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, ia mmendefenisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan sehari-hari.

Pengertian publik dalam rangakaian kata *publik policy* memiliki tiga konotasi uaitu pemerintahan, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan, dala diensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari peerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not to do*”. Kebijakan dari peerintahlah yang akan dianggap sebagai kebijakan yang resmi,, sehingga mmempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya (dalamm Abidin,, 2016 : 7).

Thomas R. Dye (dalam taali, 2024 :112) menekankan pada pilihan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan sinyal bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya tentang perencanaan dan rencana, tetapi juga peilaian terhadap tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah.

2.1.6 Teori Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “*layani*” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelaynan, bahksan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sutoro 2005 dalam (Sedana, Dkk, 2025 : 73) pelayanan publik sebagai semua bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Aryawan (2021 : 6) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan aupun pelaksana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dasar kebijakan pelayanan publik saai ini, dasar hukum utama praktek penyelnggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009.

Osbornen& Geabler 1992 dalam (Supriatna, Dkk, 2025 : 53) pelayanan publik merupakan menifestasi dari hadrinya negara untuk melayani, bukan

menguasai. Di sinilah hadir konsep *new public management* muncul, menekankan pentingnya layanan publik yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pengguna (*customer-oriented government*).

Menurut pendapat Lewis dan Gilman 2005 dalam (Hayat, 2017 : 21) bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Wibowo 2009 (dalam Sedana, Dkk, 2025: 73) mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan barang dan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendapat Indri dan Hayat 2015 pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan.

Sutoro 2005 (dalam Sedana Dkk, 2025 : 730) dalam memberikan pelayanan publik para penyelenggara pelayanan wajib memperhatikan asas-asas pelayanan publik meliputi:

- a. Asas keadilan, setiap individu harus mendapatkan layanan yang adil dan tanpa diskriminasi.
- b. Asas transparansi, pelayanan publik harus dilakukan dengan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengetahui proses serta hasil layanan.

- c. Asas akuntabilitas, penyelenggara layanan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- d. Asas efisiensi, penggunaan sumber daya harus dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- e. Asas efektivitas, layanan harus memenuhi tujuan dan hasil yang telah ditetapkan
- f. Asas responsivitas pelayanan harus cepat dan tepat dalam menangani kebutuhan masyarakat.
- g. Asas kepastian hukum, semua tindakan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Kencana Syafiie dan Welasari 2015 dalam (Hayat 201 : 16), memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan itu berkualitas, sebagai berikut :

- 1. Adanya kandalan (*reability*)
- 2. Adanya tanggapan baik (*responsiveness*)
- 3. Adanya kecakapan yang berwenang (*competence*)
- 4. Adanya jalan untuk memulai (*acces*)
- 5. Adanya sopan santun (*courtesy*)
- 6. Adanya hubungan baik (*communication*)
- 7. Adanya kepercayaan (*security*)
- 8. Adanya jaminan (*credibility*)
- 9. Adanya pengertian (*understanding*)
- 10. Adanya penampilan yang baik (*appearance*)

Rahma yanti 2013 (dalam Hayat, 2017 : 17) merekomendasikan lima pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima, yaitu :

1. Regulasi layanan (*service regulation*). Untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan, setiap organisasi harus membangun regulasi dalam bentuk sistem, aturan, keputusan, prosedur, dan tata cara lainnya dalam menerima maupun mendapatkan pelayanan dalam standar pelayanan yang ditentukan.
2. Fasilitas-fasilitas lainnya (*service facilities*). Fasilitas sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan menjadi penting juga untuk diperhatikan. Fasilitas atau sarana prasana pendukung adalah sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja pelayanan..
3. Peran tim pengarah (*advisory team*). Tim pengarah sebagai kontrol penuh terhadap manajemen tertinggi organisasi. Perannya memberikan pengarahan terhadap penyelenggara pelayanan dalam membuat perencanaan, melakukan monitoring, memberikan motivasi, menjadi teladan, tergabung dalam asosiasi untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik.
4. Mudah, murah, cepat, dan manfaat (*simple, cheap, fast, and benefit*). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang pelayanan publik, bahwa kemudahan, kecepatan dan kemanfaatan pelayanan adalah menjadi hak warga negara untuk penerimaan pelayanan.
5. Membudayakan pemberian pelayanan yang baik, melalui : (a) *self awareness*. Kesadaran pribadi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan. (b) *athusiasm*.. memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau gairah. (c) *reform*. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan.

(d) *value*. Pelayanan harus memberikan nilai tambah. (e) *impressive*. Pelayanan harus diberikan dengan cara yang menarik dan mempunyai kesan yang baik. (f) *care*. Memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan secara optimal. (g) *evaluation*. Pelayanan yang telah diberikan harus selalu dievaluasi secara rutin.

Berdasarkan pendapat diatas pengertian standar pelayanan yang baik adalah suatu kunci keberhasilan sebuah organisasi atau bisnis. Dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan efisien, masyarakat akan merasa dihargai dan mereka akan puas akan pelayanan tersebut.

2.1.7 Teori Konsep Program Kerja

Dalam jurnal (akbar & Rakamayhudi, 2022 : 52) program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan,, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan.

Berdasarkan yang diatas program kerja adalah pedoman, landasan, dan rangkaian yang disusun sistematis untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.8 Teori Otonomi Daerah

Menurut Mohammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih (Santosa, Dkk, 2024 : 100) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Fernandez 2002 (dalam Sentosa, Dkk, 2024 : 101) otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrument politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi (dalam Sentosa, 2024 : 96).

Berdasarkan diatas otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta masyarakatnya.

2.1.9 Teori Pemerintah daerah

Pemerintah daerah hal yang penting dalam organisasi daerah untuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk itu dibutuhkan komunikasi publik yang

memberikan dampak positif bagi masyarakat agar cita-cita pelaksanaan pemerintah daerah terwujudnya yaitu kesejahteraan publik dan pemenuhan kebutuhan publik lainnya (dalam Arman & Prahara, 2021 : 24)

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pedngaturan pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (dalam Setiawan, 2018 : 1).

Menurut Simangunsong (dalam Rauf, 2018 : 13) Pemerintah atau “government” memiliki pengertian yang sangat luas. Kata tersebut dapat mencakup orang atau badan yang secara politik diberi kewenangan untuk memerintah suatu entitas tertentu, atau sebuah kiat dalam menjalankan suatu proses memerintah, ataupun juga sebuah sistem atau kebijakan memerintah.

Sumaryadi (dalam Rauf, 2018 : 15) secara umum mendefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat da menerpakan hukum serta UU diwilayah tertentu.

Secara mendalam, otonomi daerah dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, respondif, dan inklusif (dalam Buku, Setiawan, 2024 : 51).

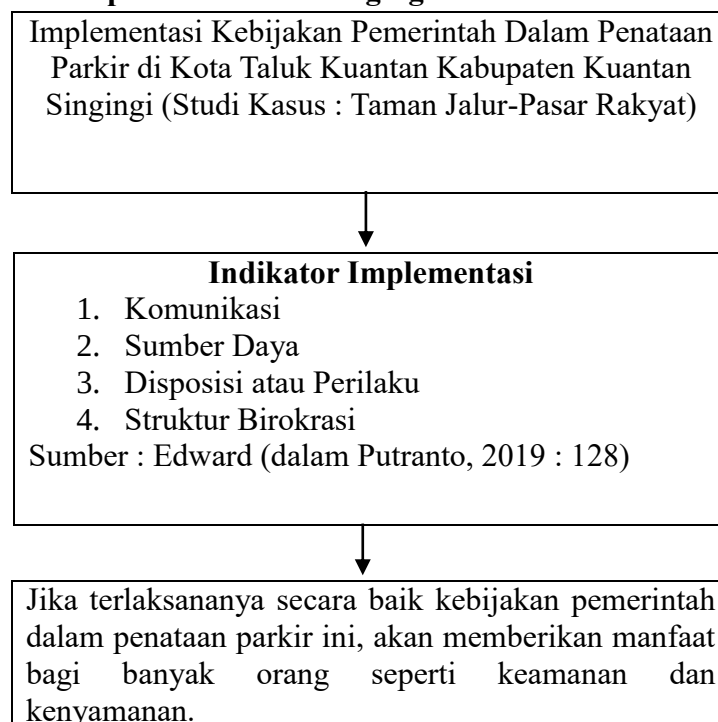
2.2 Kerangka Pemikiran

Hayati (dalam Syahbudi, 2023 : 77) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek atas permasalahan yang diperlukan dalam metode penelitian sehingga kerangka berpikir disusun berdasarkan kriteria utama berupa alur-alur pemikiran logis.

gejala yang menjadi objek permasalahan. Dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini akan mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Dengan ini seorang peneliti menggunakan pendekatan implementasi untuk mengetahui bagai mana alur dari kebijakan pemerintah dalam penataan parkir ini.

Selain itu suatu kerangka pemikiran sangat diperlukan bagi seorang peneliti yang berguna untuk menjelaskan tentang pengertian tentang suatu fenomena. landasan ini harus ditegakkan agar peneliti mempunyai dasar yang memperkuat apa yang akan diteliti.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

2.3 Hipotesa Kerja

Berdasarkan latar belakang dan kajian-kajian diatas, hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum memadai dan masih menggunakan badan jalan dan ditepi jalan raya sebagai tempat parkir”.

2.4 Defenisi Operasional

Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengatur variabel. Konsep variabel merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasioanal dari suatu penelitian.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman).

2.4.1 Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Putranto, 2019 : 130) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi kominikator kepada komunikan”. salah satu faktor yang penting dalam penataan parkir Dikota Taluk. Karena komunikasi yang jelas sangat diperlukan agar tahu informasi terkait aturan, konsekuensi, peran, dan prosedurnya dalam perparkiran ini.

2.4.2 Sumber daya

Edwar III (Putranto, 2019 : 131) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Yang dimana meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya

peralatan, sumber daya informasi, dan sumber daya kewenangan. dalam penataan parkir ini sumber daya memiliki peran penting agar aturan, prosedur, dan sistem pengelolaan dapat diterapkan dengan efektif.

2.4.3 Disposisi

Edward III (dalam Putranto, 2019 : 136) disposisi adalah sebagai kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan tadi secara sungguh sehingga apa menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan Untuk memastikan bahwa sikap, komitmen, pemahaman, dan kemauan para pelaksana kebijakan (terutama aparatur pemerintah, juru parkir, pengawas dan pihak terkait lainnya) dalam menjalankan kebijakan penataan parkir sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar berjalan dengan baik dan benar agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III (Putranto, 2019 : 141) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Struktur ini penting agar sistem penataan parkir berjalan dengan tertib, terkoordinasi, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.5 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi variabel merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu Peneliti mengenai penjelasan variabel yang dipilih oleh peneliti.

Tabel 2.1 Konsep, Indikator dan Item Penilaian

Konsep	Indikator	Item penilaian	Ukuran
Teori Implementasi menurut	komunikasi	a. Kejelasan (<i>Clarity</i>) b. Konsistensi (<i>consistency</i>) c. Transmisi (<i>Tranmision</i>)	Ordinal
Edward III (dalam Putranto, 2019 : 128)	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumberdaya anggaran c. Fasilitas /sarana-prasarana	Ordinal
	Disposisi atau Perilaku	a. Pelaksanaan secara sungguh-sungguh b. Pengetahuan pelaksanaan	Ordinal
	Struktur Birokrasi	a. Standar operating procedures (SOP) b. Fragmentasi Kelembagaan	Ordinal

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu suvey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif.

Penelitian suvey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (dalam Sugiyono, 2017 : 7).

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri (dalam Sugiyono, 2017 : 35).

Metode penelitian kualitatif seiring disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (dalam Sugiyono, 2017 ; 8)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertent (Sugiyono, 2016 : 299).

3.2 Informan

Akbar Ibrahim 2005 (dalam Ishar : 6) menyatakan bahwa informasi adalah orang-orang memberikan informasi dan keterangan dalam suatu kajian tertentu.

Menurut West 1992 (dalam Ishar, 2016 : 6) mengatakan informan adalah sama dengan klien atau individu yang akan menjawab berbagai pertanyaan dalam sistem kualitatif.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Dinas Perhubungan di Kabupaten Kuantan Singingi, dan para juru parkir, karena informan yang dipilih dianggap lebih memahami mengenai judul proposal ini yaitu “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus ; Jl. Jendral Sudirman)”.

Tabel 3.1 : Informan Penelitian Impementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama Responden	Jumlah
1	Kepala Dinas Perhubungan dan Bidang Perpikiran	2
2	Juru Parkir	4
3	Masyarakat	6
Jumlah		12

Sumber data : Data Olahan Peneliti 2026

Dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu hanya 12 orang. Maka peneliti menggunakan metode sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono (2017).

Berdasarkan tabel diatas dalam penelitian ini informan yang diambil 2 orang dari pihak Dinas Perhubungan sebagai pihak yang mengelola dan pengambilan kebijakan dalam penataan parkir, setelah itu juru parkir diambil sebanyak 4 orang karena mereka pelaksana yang terlibat langsung dilapangan, dan sementara informan masyarakat diambil 6, masyarakat yang dimaksud yaitu pengunjung. Meskipun pengunjung parkir itu banyak tetapi penelitian ini hanya mengambil 6 orang pengunjung sebagai informan karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi fokus utama bukan jumlah responden melainkan bisa memahami kedalaman informasi dan persepsi pengunjung terhadap Penataan Parkir di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman) agar bisa melakukan wawancara secara lebih mendalam sehingga informasi yang diperoleh menjadi rinci sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

3.3 Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh data berkaitan dengan objek yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

3.2.1 Data Primer

Data primer ialah data yang akan peneliti peroleh langsung dari Dinas Perhubungan di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya kepada juru parkir yang ada di Jl. Jendral Sudirman, dan masyarakat/pelanggan. Data ini meliputi kondisi yang terjadi dilapangan Parkir Dikota Taluk Kuantan (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman).

3.2.2 Data Sakunder

Data sakunder yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, dan data yang diambil dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Fokus Penelitian

Penulis melakukan fokus penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi(Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman).

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi peneltian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Penelitian dilakukan di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Alamat Jalan Sudirman, Ps. Taluk Kuantan, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman).

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam, dan jumlah responden yang sedikit/kecil (Sugiyono, 2017 : 157).

2. Obseevasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2017 : 166).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009 : 240). Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lainnya.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu Data Reducation, Data Display, Conclution Drawing/Verification (Sugiyono, 2017 : 246).

Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut (Sugiyono, 2017 : 246).

1. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat

secara teliti dan rinci. Dengan melakukan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Suiyono. 2016 : 247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249).

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.8 Jadwal kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus: Jl. Jendral Sudirman).

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN																																
Proposal	PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGU KE-																															
	Sep. 25				Nov.25				Des.. 25				Jan.25				Feb.26				Mar.26				April. 26				Mei. 26			
Penelitian	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Minggu ke																																
Penyusunan dan Pembuatan Proposal																																
Bimbingan Proposal																																
Pencarian Data Awal																																
Seminar Proposal																																
Revisi Proposal																																
Bimbingan Skripsi																																
Sidang skirpsi																																
Revisi Skripsi																																

Sumber : Modifikasi Peneliti 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkan Undang-undang nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkependudukan di Taluk Kuantan.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dimana pemerintahan yang tadinya berada di tangan Datuk, kini berubah bentuk menjadi sistem dan corak pemerintahan modern yang merupakan penjabaran atau Undang-undang Dasar 1945 yang berlaku di negara ini, dan begitu juga desa-desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelumnya berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi, Kuantan Hilir merupakan salah satu bagian dari wilayah Indragiri Hulu. Dinamakan Kuantan Hilir pada waktu itu Karena ada tiga kecamatan yang dialiri oleh Sungai Kuantan, yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengan dan Kecamatan Kuntan Hilir yang terletak di daratan sebelar Hilir Sungai Kuantan.

Bergulirnya Era Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 tidak disia-siakan oleh tokoh dan kalangan masyarakat Rantau Kuantan dalam menyuarakan aspirasi

terhadap pembentukan kabupaten baru. Perjuangan demi perjuangan yang dilalui pada saat itu pada akhirnya membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk di dalamnya adalah masyarakat Kuantan Hilir. Nama Kabupaten Kuantan Singingi sendiri diambil dari dua aliran sungai, yaitu sungai Kuantan dan Sungai Singingi (Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, 2004).

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kuantan Singini terletak pada posisi Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut.

4.1.2 Batas Wilayah

Batas wilayah administrasi Kabupaten kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- c. Sebelah Barat berbatasan Provinsi Sumatra Barat.
- d. Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Visi Kabupaten Kuantan Singingi

Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius,

Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau.

b.Misi Kabupaten Kuantan Singingi

1. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat.
2. Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis.
3. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing.
4. Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah.
5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.2 Sejarah Dinas Perhubungan

Sejarah berdiri Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari awal terbentuknya Provinsi Riau pada tahun 1958, setelah terbentuknya Provinsi Riau terbentuk juga dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kuantan di Provinsi Riau.

Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau tranpostasi untuk daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan atau biasa disingkat dishub merupakan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis, bidang perhubungan penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.

4.2.1 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan

a. Visi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

Mendukung aktivitas ekonomi dengan mewujudkan sistem transportasi modern, yang mengutamakan keselamatan masyarakat.

Visi yang mempunyai makna : Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dikota sesuai dengan perkembangan sistem transportasi yang Andal dan Berkeselamatan Dalam Mendorong dan Menumbuh Kembangkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem transportasi yang andal berarti pelayanan transportasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara regular.
2. Terwujudnya sistem transportasi yang berkeselamatan berarti pelayanan transportasi dapat terselenggara dengan baik dan mampu menjamin keselamatan penumpang pengendara, dan pengguna transportasi lainnya.
3. Mendorong dan menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat berarti bahwa pelayanan transportasi diharapkan mampu menjadi kekuatan pendorong dan pendukung pembangunan ekonomi wilayah terutama dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta

potensi lainnya. Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan tersebut, perlu kiranya dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntas oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai lingkungan Dinas perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan serta mengetahui peran dan programnya bahkan termasuk hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan mendatang.

b.Misi Dinas Perhubungan

Apun misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas.
2. Mewujudkan perencanaan,, pelaksanaan, dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan.
4. Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, teratur,, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien.

4.3 Taman Jalur

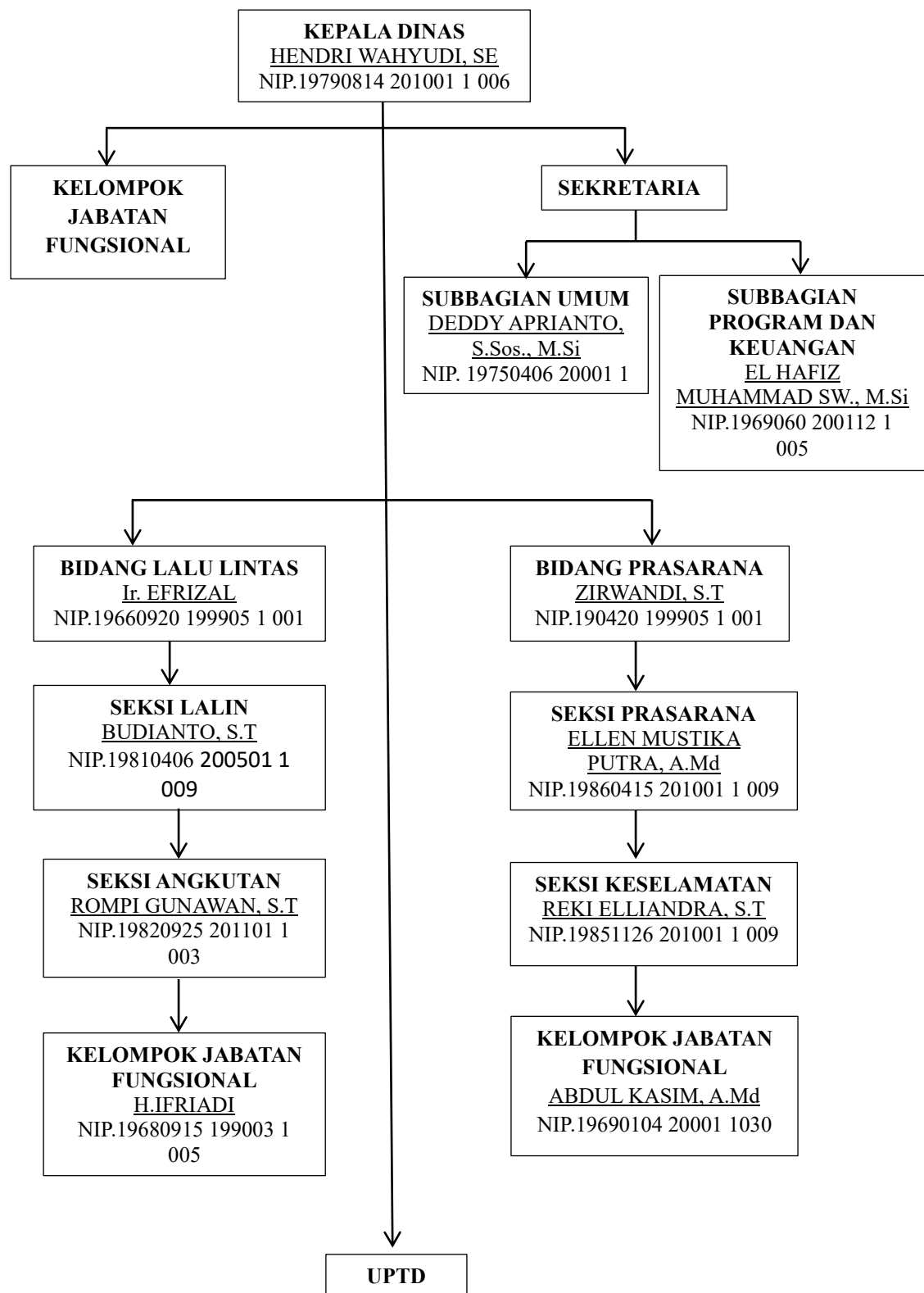
Sejarah Taman Jalur di Kuantan Singingi berawal dari abad ke-17 Taluk Kuantan merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai kuantan. Sungai ini sejak dahulu menjadi jalur utama transportasi, perdagangan, dan interaksi sosial

masyarakat. Seiring perkembangan kota, kawasan tepian sungai kemudian ditata menjadi ruang publik yang dikenal sebagai Taman Jalur yang dinamai dari tradisi budaya Pacu Jalur, warisan budaya khas Kuntan Singingi.

4.4 Pasar Rakyat

Pasar Rakyat Taluk Kuantan merupakan sebuah pasar tradisional di ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Rakyat ini terletak di jalan jendral sudirman. Pasar Rakyat Taluk Kuantan dibangun pada tahun 2002 yang status kepemilikan lahannya milik Pemerintah Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan lahan. gedung dipasar rakyat memiliki 3 tingkatan yang jumlah kios keseluruhannya adalah 427 unit, dan 2 unit los dengan jumlah seluruh lapak dalam los adalah 104 unit.

4.5 Struktur Dinas Perhubungan



BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus : Jl. Jendral Sudirman) sudah bisa dibilang cukup terimplementasi. Hal ini dilihat dari pendapat informan dan kondisi lapangan mengenai bahwa kebijakan parkir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi pengaturan lokasi parkir, tarif, peran juru parkir, maupun pengawasan oleh pihak terkait. Dikota Taluk Kuantan di Jl. Jendral Sudirman masih ada kendaraan yang belum tertib dan sebagian sudah tertib. Meskipun masih ada kendala dalam parkir ini perlunya pemahaman sebagian masyarakat dalam perparkiran ini dalam menertibkan kendaraan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat meningkatkan kwalitras juru parkir dan fasilitas pendukung dengan diperlukannya pembinaan rutin kepada juru parkir serta penyediaan fasilitas harus dilengkapi seperti, kartu identitas, rambu, dan marka parkir guna menciptakan pelayanan parkir yang aman dan profesional.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dengan memanfaatkan media informasi yang mudah diakses dengan membuatkan spanduk agar masyarakat bisa patuh dengan aturan dan tertib dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abidin Zainal Said., 2016, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Selembaka Humika.
- Arman, Sandi., 2021, *Analisis Pemerintah Daerah*, CV Cahaya Publisher & Printing.
- Aryawan I.D.G.S., 2021, *Mall Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Cardona David., 2020. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Scopindo Media Pustaka.
- Danang, Sunyonto., 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Buku Seru.
- Diwyarthi, Dkk., 2022, *Belajar Pengantar Manajemen*, Adab, Cv. Adanu Abimata.
- Duryat.Masduki, 2022, *Analisis Kebijakan Pendidikan Teroi dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit K-Media.
- Edison, Emron, dkk., 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, CV. Bandung.
- Faried, Ali., 2015, *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatic Meunju Redefenisi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Firzan, Isya., 2023. *Rekayasa Lintas Perancangan dan Aplikasi*, Deepublish.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Cetakan Kesampatn Belas, Bumi Askara, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksar.

- Hayat., 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Penerbit Yrama Widya.
- Ishar., 2016, *Sejarah Kesultanan Melayu Sanggau*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Iswadi, 2025, *Teori Organisasi*, PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- M Sarjan, Dkk., 2025, *Pilkada Langsung Dan Kesadaran Politik Masyarakat Pedesaan*, CV Budi Utama.
- Mulyadi., 2015, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, Alfabeta di Bandung.
- Nuridin., 2023, *Teori Organisasi Dalam Perspektif Pendidikan*, Indonesia Emas Group.
- Putranto Dwi., 2019, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Bangunan Gedung di daerah*, Zifatama Jawa.
- Rauf Rahyunir., 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, NusenMedia Yogyakarta.
- Santosa, Dkk., 2024, *Buku Ajar Teori-teori Pemerintahan*, Mega Press Nusantara.
- Sedana, Dkk., 2025, *Efesensi Pelayanan Publik Di Era Kecerdasan Buatan*, Widina Media Utama.
- Setiawan Irfan., 2018, *Handbook pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi
- Setiawan, Dkk., 2024, *Pengawasan Pemerintah Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, CV. Rtujuh Media.
- Sinambela Lijan Poltak., 2021, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Aksara.
- Sugiyono., 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabela CV.

Sugiyono., 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta Bandung.

Syahbudi, Dkk., 2023, *Buku Ajar : Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Merdeka Kreasi Gro

Taali, Dkk., 2024, *Teori Dan Model Evaluasi Kebijakan : Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*, PT. Sonpedia Publhising Indonesia.

JURNAL :

Akbar & Rakhamayhudi., 2022, *Sistem Informasi Laporan Program Kerja Operator Di Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang Cabang Pamanukan*, GLOBAL , Vol. 9, No. 2, Bulan Juli.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

**Tentang : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan
Parkir Dikota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan
Singing (Studi Kasus : Taman Jalur-Taman Jalur)**

Kepada :

A. Identitas Peneliti

Nama : Nina Suriani
NPM : 220411059
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan pihak siapapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiannya.

3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih.

D. Indikator

I. Indikator Komunikasi (Kejelasan, Konsistensi, dan Tranmisi)

1. Apakah kebijakan pemerintah terkait penataan parkir di Kota Taluk Kuantan telah disampaikan dengan jelas terutma mengenai aturan lokasi, tarif parkir, serta tugas dan tanggung jawab pihak terkait?

Berikut ulasan

.....S

.....

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana persepsi pelaksanaan kebijakan penataan parkir di Taluk Kuantan

Berikut ulasan

.....

.....

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tranmisi dalam penataan parkir?

.....

.....

II. Indikator Sumber Daya (SUMBER Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Fasilitas Sarana dan Prasarana)

1. menurut Bapak/Ibu apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam penataan parkir di Kota Taluk Kuantan sudah memadai untuk melaksanakan kebijakan parkir dengan baik?

.....
.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kecukupan dan penggunaan anggaran pemerintah dalam penataan parkir di Kota Taluk Kuantan?

.....
.....

3. bagaimana menurut Bapak/ibu pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana parkir terhadap ketertiban parkir di Kota Taluk Kuantan?

.....
.....

III. Indikator Disposisi (Pelaksanaan Secara Sungguh-sungguh dan Pengetahuan Pelaksana)

1. Bentuk menurut Bapak/Ibu bentuk komitmen dan keseriusan para pelaksana dalam menerapkan penataan parkir di Kota Taluk Kuantan?

.....
.....

2. Apakah penataan parkir di Kota Taluk Kuantan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau hanya bersifat formalitas?

.....
.....

3. bagaimana tingkat pemahaman pelaksana dan pengguna parkir terhadap ketentuan penataan parkir di Kota Taluk Kuantan?

.....
.....

IV. Indikator Struktur Birokrasi (Standar Operating Prosedure dan Fragmentasi Kelembagaan)

1. Apakah penataan parkir di Kota Taluk Kuantan telah memiliki SOP yang jelas?

.....
.....

2. menurut Bapak/Ibu pelaksanaan penataan parkir di Kota Taluk Kuantan telah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemerintah? jelaskan

.....
.....

3. apakah Fragmentasi kewenangan tersebut mempengaruhi efektivitas penataan parkir di Kota Taluk Kuantan?

.....
.....

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara langsung Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 2. Wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 3. Wawancara langsung dengan juru parkir



Gambar 4. Wawancara langsung dengan juru parkir



Gambar 5. Wawancara langsung dengan masyarakat/ pengunjung



Gambar 6. Wawancara langsung dengan masyarakat/ pengunjung



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 046 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (SI) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (SI) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian P-jabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
 - b. Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nina Suriani
NPM : 2204111059
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Parkir di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (SI) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (SI) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PERHUBUNGAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Telp. (0760) 56847 Kode Pos 29562
TELUK KUANTAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 550/DISHUB-KS/II/2026/165

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : NINA SURIANI

Nim : 220411059

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Fakultas : ILMU SOSIAL

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Dasar : Surat Rekomendasi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor :219/DPMPTSPK-PTSP/1.04.02.02/2025 tanggal 18 November 2025.

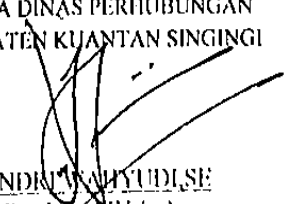
Telah melaksanakan penelitian / riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul

“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PARKIR DI KOTA TALUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS : TAMAN JALUR – PASAR RAKYAT) “

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 26 Februari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


HENDRI WAHYUDI, SE
Pembina (IV / a)
NIP. 19790814 201001 1 006



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : NINA SURIANI

NPM : 220411059

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. RIKA RAMADHANTI S.IP., M.Si
2. SARJAN.M, S.Sos., M.Si

JUDUL : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PARKIR DIKOTA
TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	11/11-2025	Pertajin latar Belakang masalah,			
		Rapikan penulisan yg salah			
	26/11-2026	Perbaiki Pendahuluan			
	07/11-2026	Tinjau Teori yg relevan			
		Definisikan operasional. lebih detail			
		Tahap Operasional			

Urusan

		Jumlah Informan			
		Jumlah pustaka			
		Gambar, daftar			
		grafik			
		Perbaiki penomoran			
		halaman.			
	selama 2 1/2	Marginalia Rapihan penulisan		1/1	
		→ Daftar pustaka 2 buah kecil			
		spesifikasi format keberagaman penulisan			
		→ Penulisan yang dibaca untuk 10 tahun ke depan			
		- Daftar pustaka			
	1/11/25	- penulisan		RR.	
		- Informan			
	5/12/25	Ace & Samudra		RR	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jaka Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Parto I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Nina Suriani

NPM : 220411059

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Parkir di Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus: Dinas Perhubungan)

Hari/Tgl Ujian : Senin / 22 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan perswaratan lainnya



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Nina Suriani
NPM : 220411059
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir di kota Taluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi (Studi kasus taman jalur pasar rakyat)

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 21 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramdhanti, S.IP., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Sos., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

saya bertandatangan dibawah ini ;



Nama	: Nina Suriani
Tempat/Tanggal Lahir	: Pulau Kulur, 20 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laku-laki
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Pulau Lancang
Pendidikan	: 1. SD Negri 009 Pulau Kulur, Tahun 2016 2. SMP Negri 02 Pulau Kulujr Tahun 2019 3. SMA Negri 01 Koto Rajo Tahun 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taluk Kuantan, 1 April 2026



Nina Suriani

220411059